

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Th. 2023

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



**Jalan Pemuda No. 55 B Seduri Mojosari
Mojokerto**

email :
blhkabupatenmojokertokab@gmail.com <https://dlh.mojokertokab.go.id> Telp : (0321) 593178

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat



kami selesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik antara Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dengan tim penyusun Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka dituntut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adanya tuntutan yang kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 memberi gambaran tentang realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan



tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, 19 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ZAQQI
Pembina Utama Muda
NIP. 197110191993021002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
a. Dasar Hukum	8
b. Tujuan dan Fungsi Penyusunan	10
1.2 Gambaran Umum OPD	11
a. Struktur Organisasi	12
b. Tugas Pokok dan Fungsi	13
1.3 Aspek Strategis OPD	14
a. Sumber Daya Aparatur	14
b. Aset yang Dimiliki	16
c. Isu Strategis Yang Dihadapi	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis	23
a. Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto	23
b. Matriks Rencana Strategis	24
c. Standar Penilaian Kinerja	25
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023	27
2.3 Perjanjian Kinerja	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	41



3.1.2	Capaian Indikator Kinerja tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022	45
3.1.3	Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Akhir Periode Renstra	56
3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja Th 2023 dengan Capaian Nasional	59
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	74
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
3.1.7	Realiasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP		85
LAMPIRAN I		
LAMPIRAN II		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Personil DLH Kab. Mojokerto	14
Tabel 1.2 Jumlah Personil PNS DLH Berdasarkan Kelamin	15
Tabel 1.3 Jumlah Personil Berdasarkan Golongan	15
Tabel 1.4 Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana di DLH Kab Mojokerto Tahun 2023.....	17
Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 -2026	23
Tabel 2.2 Matriks Renstra DLH Kabupaten Mojokerto	26
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2023.....	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala DLH Kab Mojokerto	38
Tabel 2.5 Penetapan Anggaran Per Program DLH Kab Mojokerto	38
Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja per Sasaran Tahun 2023	41
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022	45
Tabel 3.3 Hasil uji air badan air di sungai Kab. Mojokerto pada 12 titik	48
Tabel 3.4 Hasil uji udara menggunakan metode passive sampler dari KLHK maupun APBD pada 8 Titik di Kabupaten Mojokerto	54
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	56
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Th 2023 dengan Capaian Nasional	59
Tabel 3.7 Predikat IKLH	60
Tabel 3.8 Alokasi Sasaran Pembangunan	73
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	75
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Per Program/ Kegiatan Pembangunan	78



DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
3.1	Kegiatan Kali Bersih Tahun 2023.....	
3.2	Penyerahan Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	
3.3	Penanaman bibit bambu oleh Ibu Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Desa Sendi Kec. Pacet Kab. Mojokerto	
3.4	Rencana Pemulihan Kerusakan Lingkungan	
3.5	Evakuasi sampah agar tidak masuk badan air	
3.6	Pembinaan Bank Sampah sebagai upaya memilah sampah dari tingkat rumah tangga.....	
3.7	Pengawasan dan pemantauan industri yang menghasilkan emisi	
3.8	Uji emisi sumber kendaraan salah satu upaya terhadap pengendalian	
	polusi udara yang disebabkan dari emisi kendaraan bermotor.....	
3.9	Pemanfaatan lahan Kantor DLH untuk Ruang Terbuka Hijau.....	
3.10	Pengambilan sample udara untuk diuji dengan metode passive sampler	
3.11	RTH Jatirejo yang diresmikan pada tahun 2023.....	
3.12	RTH Sooko yang diresmikan pada tahun 2023	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Dasar Hukum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan diwilayah Kabupaten Mojokerto. Dalam upaya penerapan pencapaian Good Governance, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dengan mengacu pada Rencana



Jangka Panjang yang tertuang pada Rencana Strategis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sesuai amanat tersebut penyelenggaraan SAKIP melalui : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Review dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini antara lain :

- a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- b) Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- f) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 34 Tahun 2021 perubahan dari Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

g) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

b. Tujuan dan Fungsi Penyusunan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yg berlaku, kebijakan yang transparan, dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.
4. Memberikan salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto.
5. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup guna membantu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai 2 (dua) fungsi utama

1. Penyusunan LKjIP bertujuan sebagai sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup



2. LKjIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Ibu Bupati sebagai Kepala Daerah.

1.2 Gambaran Umum OPD

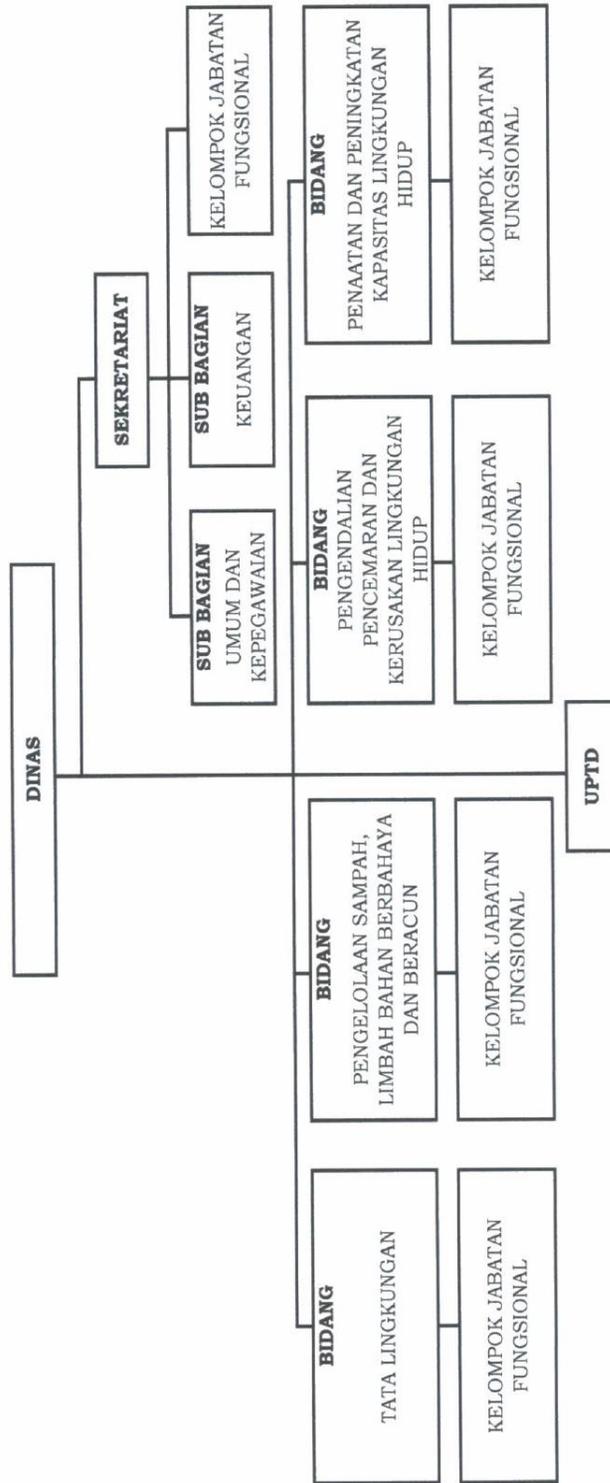
a. Struktur Organisasi

Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terlihat dalam gambar 1.1 berikut :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DLH Kab. Mojokerto

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DLH Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 yang pada Bulan September Tahun 2021 mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan mengalami perubahan terakhir menjadi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai **tugas pokok** melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto didukung struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagai berikut :

1. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 6 Tahun 2021 yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;



2. Sekretariat;
3. Bidang Tata Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. Kelompok Fungsional Tertentu;
8. UPTD Laboratorium;

1.3 Aspek Strategis OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Jumlah personil PNS dan Tenaga Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 394 orang (PNS berjumlah 128 Orang dan Tenaga Harian lepas berjumlah 266 orang). Lebih lengkap disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Personil DLH Kab Mojokerto

PNS	128	Orang
Tenaga Harian Lepas	266	Orang

Sumber : Data Kepegawaian DLH 2023



Ditinjau dari jenis kelamin, pangkat / golongan, dan tingkat pendidikan maka kondisi personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Data Personil berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa sebagian besar personil PNS di Dinas Lingkungan Hidup berjenis kelamin laki laki sebanyak 102 orang dan personil PNS yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang. Lebih lengkap disajikan dalam Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – laki	102	Orang
Perempuan	26	Orang

Sumber: Data Kepegawaian DLH 2023

2. Data Personil berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian besar personil di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai golongan I dan II yang sangat banyak. Kedua golongan ini didominasi oleh Petugas Lapangan di Bidang Kebersihan maupun Bidang Pertamanan. Banyaknya personil berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3

Jumlah Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Jenis Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	7
2.	Golongan III	34
3.	Golongan II	67
4.	Golongan I	20



Sumber: Data Kepegawaian DLH 2023

3. Data Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa rata rata personil memiliki tingkat pendidikan SMP, SMA dan Sarjana. Banyaknya personil berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4

Jumlah Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Doktor	-
2.	Pasca Sarjana	7
3.	Sarjana	30
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	-
6.	SMA	58
7.	SMP	24
8.	SD	9

Sumber : Data Kepegawaian DLH 2023

b. Aset Yang Dimiliki

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terlihat pada tabel 1.5 :



Tabel 1.5

Jumlah Sarana dan Prasarana di DLH Kab Mojokerto Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
I	Bangunan	
1.	Gedung Kantor	7
2.	Pagar Kantor/Taman	5
3.	Gudang Terbuka/Tertutup	8
4	Gudang Arsip	1
5	Garasi TPA	1
6	Taman	7
7	Tempat parkir	1
8	Gedung Perpustakaan di TPA	1
9	Bank Sampah	3
10	Menara Air	1
11	Monumen UKS	1
12	Mushola	1
13	Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	1
14	Pos Jaga	1
15	Rumah Kompos	2
16	Sumur Pantau	1
II	Kendaraan Dinas	
17	Mobil operasional dan lapangan	17
18	Truk Amroll/DAM	25



19	Sepeda Motor	31
20	Sepeda Motor Roda 3	25
II	Alat Berat	
21	Skid Loader	1
22	Excavator	3
23	Bulldoser	1
III	Peralatan Kantor	
24	Meja Kursi	377
25	Printer dan Scanner	50
26	Laptop/Notebook	42
27	Tablet	2
28	PC	5
29	Mesin Penghancur Kertas	1
30	Mesin Absensi	2
31	Faximile	1
32	Proyektor	7
33	Lemari Besi/Kaca/Kayu	20
34	Sepeda	4

Sumber Data : Data Pengurus Barang DLH 2023

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026 (Renstra DLH 2021 – 2026 dan Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022) isu strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto, dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang menjadi prioritas utama dan wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:



1. Pencemaran Sungai.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas air adalah Pencemaran air sungai karena nilai BOD dan COD ada yang melebihi standar baku mutu, hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Pertambahan penduduk dan meningkatnya aktifitas pembangunan yang menghasilkan beban pencemaran ke sungai :
 - Limbah domestik (sampah, tinja/ black water, dan air buangan rumah tangga/ grey water)
 - Limbah pertanian dan perkebunan (pupuk dan pestisida parameter N dan P, serta sedimen akibat pembukaan lahan dan erosi lahan parameter TSS).
 - Limbah industri (BOD dan COD).
- b. Hasil inventarisasi kegiatan di sepanjang sungai, masih banyak kegiatan yang membuang limbah padat dan limbah cair berasal dari domestik, pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri.
- c. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan (Tabel-34) mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan.
- d. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar sendiri dan melakukan aktifitas Buang Air Besar (BAB) di sungai.

1. Pencemaran Udara.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas udara adalah pencemaran udara, hal ini dikarenakan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :



- a. Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak.
 - b. Infrastruktur jalan yang berubah
 - c. Meningkatnya kendaraan akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat.
 - d. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.
 - e. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar menimbulkan asap dan debu berlebihan.
 - f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, padahal memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.
2. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
- Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah B3 yaitu :
- Aktivitas kegiatan terminal, industri, Rumah Sakit, Hotel, dan Pariwisata menghasilkan limbah padat, cair, dan B3.
 - Masih adanya industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan dengan kondisi IPAL masih belum dapat bekerja optimal.
 - Masih sedikit kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan izin penyimpanan limbah B3.
 - Kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang sudah mempunyai IPLC limbah B3 tetapi masih kesulitan untuk pengelolaannya.



2. Persampahan

Permasalahan utama yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah yang kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan manusia, banjir, menimbulkan sarang penyakit, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, lingkungan akan menjadi kumuh serta bau yang tidak sedap dan merusak keindahan visual kota/ kabupaten itu sendiri. Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab berbagai masalah yang diakibatkan volume sampah yang meningkat yaitu :

- Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah.
- Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggir jalan.
- Program pengurangan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal.
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.
- Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 3R.
- Kurangnya armada pengangkut sampah dan sarana pengolahan sampah di TPA.

3. Pemanfaatan Lahan (Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH))

Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) diakibatkan adanya alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan dari tanah pertanian atau lahan terbuka menjadi kawasan pemukiman, kawasan komersial, dan sejenisnya yang cukup pesat ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian/ lahan terbuka di Kabupaten Mojokerto.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Organisasi perangkat kerja Daerah (OPD) harus menyusun rencana strategis dengan pedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun. Sesuai dengan masa jabatan Bupati Mojokerto. Dengan demikian maka rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup harus konsisten dengan RPJMD dimaksud.

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata sedangkan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip – prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensinya rencana dan atau program pembangunan berkelanjutan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosiasl ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bersama-sama jajarannya telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai



tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.

1.1 Perencanaan Strategis

- a. Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021- 2026

Visi : “Terwujudnya kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif ygang dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan				
2	Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi kerakyatan				
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan				



4	Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua sector untuk mendorong Pertumbuhan EKonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.	Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas 2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2.Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau
---	--	---	---	--	---

b. Matriks Rencana Strategis

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Tujuan :

- Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 : 64,53 (Tanpa Satuan). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut terdiri dari 3 komponen yang menjadi Indikator Tujuan Utama Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 37,6%, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 40,5%, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 21,9%.

2. Tujuan : Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani.

Indikator Tujuan :

- Target Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hiiiau Tahun 2023 : 18,39%.

Matriks Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini :



c. Standar Penilaian Kinerja

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>



Tabel 2.2 Matriks Renstra DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Thn 2021	Target Thn 2022	Target Thn 2023	Target Thn 2024	Target Thn 2025	Target Thn 2026
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,37	63,88	64,20	64,53	64,86	65,20	65,52
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60 88,26 49,20	52,3 82,5 49,31	52,5 83 49,54	52,7 83,5 49,77	52,9 84 50	53,1 84,5 50,28	53,3 85 50,46
	Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani		- Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau	13,92%	14,56%	16,40%	18,39%	20,54%	22,84%	25,30%
		Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	- Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	13,92%	14,56%	16,40%	18,39%	20,54%	22,84%	25,30%



1.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								27,415,934,000	29,723,675,557			37,386,101,232				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,202,063,777	13,727,671,451			18,627,983,681				
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,409,000	11,409,000			59,609,500				
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	75.6 Nilai	75.6 Nilai	5,869,000	5,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	21,218,000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	5 Laporan	5 Laporan	75.6 Nilai	75.6 Nilai	5,540,000	5,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	38,391,500
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,320,086,000	12,690,358,500			16,494,737,181				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	145 Orang/ bulan	145 Orang/ bulan	75.6 Nilai	75.6 Nilai	12,320,086,000	12,690,358,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	16,489,737,181



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				150,000,000		
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	3 Orang	3 Orang	75.6 Nilai	75.6 Nilai	0	0	Dana Insentif Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	50,000,000
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										125,269,750	171,800,000				289,770,000		
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	5 Paket	5 Paket	75.6 Nilai	75.6 Nilai	17,500,000	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	100,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	15 Paket	15 Paket	75.6 Nilai	75.6 Nilai	10,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	15,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	7 Paket	7 Paket	75.6 Nilai	75.6 Nilai	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	19,770,000
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	4 Paket	4 Paket	75.6 Nilai	75.6 Nilai	34,300,000	34,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	40,000,000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	12 Laporan	12 Laporan	75.6 Nilai	75.6 Nilai	5,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	15,000,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	12 Laporan	12 Laporan	75.6 Nilai	75.6 Nilai	45,469,750	82,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	100,000,000
2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										8,000,000	8,000,000				817,867,000		
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	2 Unit	2 Unit	75.6 Nilai	75.6 Nilai	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	8,000,000



Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mojokerto

2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										465,900,177	514,740,201				466,000,000		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	12 Laporan	12 Laporan	75.6 Nilai	75.6 Nilai	249,900,177	298,740,201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	250,000,000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	12 Laporan	12 Laporan	75.6 Nilai	75.6 Nilai	216,000,000	216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	216,000,000
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										271,398,850	331,363,750				350,000,000		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	82 Unit	82 Unit	75.6 Nilai	75.6 Nilai	185,485,100	245,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	250,000,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	3 Unit	3 Unit	75.6 Nilai	75.6 Nilai	60,913,750	60,913,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	75,000,000
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A) nilai	81,54 (A) nilai	40 Unit	40 Unit	75.6 Nilai	75.6 Nilai	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A) nilai	25,000,000
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										524,866,250	524,866,250				295,000,000			
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										84,866,250	84,866,250				135,000,000		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,41 %	56,41 %	4 Dokumen	4 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	56,250,000	56,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai	56,41 %	65,000,000
					Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup													Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	56,41 %	56,41 %	106 Dokumen	106 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	28,616,250	28,616,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	56,41 %	70,000,000
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											440,000,000	440,000,000				160,000,000
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	56,41 %	56,41 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	440,000,000	440,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	56,41 %	120,000,000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											720,881,550	957,799,170				1,481,497,200
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											579,404,500	816,322,120				1,070,497,200
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	48,91 %	48,91 %	6 Dokumen	6 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	108,926,250	116,571,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	48,91 %	269,000,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	48,91 %	48,91 %	2 Dokumen	2 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	470,478,250	699,750,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	48,91 %	801,497,200
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											41,027,500	41,027,500				161,000,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023



Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mojokerto

2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	48,91 %	48,91 %	2 Laporan	2 Laporan	64.53 Indeks	64.53 Indeks	18,923,750	18,923,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	48,91 %	86,000,000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah Titik Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	48,91 %	48,91 %	55 Titik	55 Titik	64.53 Indeks	64.53 Indeks	22,103,750	22,103,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	48,91 %	75,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											100,449,550	100,449,550				250,000,000
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	7,20 %	7,20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	18,572,000	18,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	7,20 %	40,000,000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	7,20 %	7,20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	45,202,550	45,202,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	7,20 %	110,000,000
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	7,20 %	7,20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	36,675,000	36,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	7,20 %	100,000,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											5,952,332,023	6,284,033,536				8,491,426,850
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											5,952,332,023	6,284,033,536				8,491,426,850
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup	Persentase penanganan RTH	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	69,00 %	69,00 %	0.0835 Ha	0.0835 Ha	18.39 %	18.39 %	29,790,000	29,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten	69,00 %	50,000,000
						Mojokerto yang Terkelola	Kewenangan Kabupaten/Kota												Mojokerto yang Terkelola		



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas Area Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan RTH	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kelurahan	69,00 %	69,00 %	8.2 Ha	8.2 Ha	18.39 %	18.39 %	5,340,987,500	5,651,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Luas Area Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	69,00 %	7,850,000,000	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Persentase Luas Area Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Persentase penanganan RTH	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	69,00 %	69,00 %	1030 Unit	1030 Unit	18.39 %	18.39 %	581,554,523	602,756,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Luas Area Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	69,00 %	465,401,850	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														9,968,750	9,968,750			105,000,000	
2	11	05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3														6,640,000	6,640,000			100,000,000
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	3 Laporan	3 Laporan	64.53 Indeks	64.53 Indeks	6,640,000	6,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	100,00 %	100,000,000	
2	11	05	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														3,328,750	3,328,750			5,000,000
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	3,328,750	3,328,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengolaannya	100,00 %	5,000,000	



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	57,60 %	57,60 %	5 Dokumen	5 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	7,147,500	7,147,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	57,60 %	10,000,000
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														150,843,750	155,843,750		275,000,000	
2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														150,843,750	155,843,750		275,000,000
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	14,94 %	14,94 %	3 Lembaga	3 Lembaga	64.53 Indeks	64.53 Indeks	19,475,000	19,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	14,94 %	50,000,000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	14,94 %	14,94 %	2 Dokumen	2 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	91,368,750	96,368,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	14,94 %	125,000,000



Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mojokerto

2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	14,94 %	14,94 %	50 Orang	50 Orang	64.53 Indeks	64.53 Indeks	40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	14,94 %	100,000,000		
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															37,996,250	37,996,250			50,000,000	
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															37,996,250	37,996,250			50,000,000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	39,00 %	39,00 %	30 Entitas	30 Entitas	64.53 Indeks	64.53 Indeks	37,996,250	37,996,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	39,00 %	50,000,000		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															26,666,300	26,666,300			133,958,501	
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota															26,666,300	26,666,300			133,958,501
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	70,00 %	70,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	22,961,300	22,961,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	70,00 %	118,958,501		
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	Persentase Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	70,00 %	70,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.53 Indeks	64.53 Indeks	3,705,000	3,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh	70,00 %	15,000,000		



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	99,00 %	99,00 %	50 Kelompok	50 Kelompok	64.53 Indeks	64.53 Indeks	215,330,000	215,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99,00 %	583,735,000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan pemrosesan Akhir	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdiyeng Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	99,00 %	99,00 %	113 Unit	113 Unit	64.53 Indeks	64.53 Indeks	1,698,985,000	1,698,985,000	Dana Insentif Daerah	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99,00 %	214,000,000
TOTAL																27,415,934,000	29,723,675,557			37,386,101,232	



1.3 Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mojokerto Tahun 2023 seperti tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,7
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,5
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,77
2	Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau	18,39%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	40
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

b. Penetapan Anggaran Per Program Pada Perjanjian Kinerja Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 seperti tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5

Penetapan Anggaran Per Program Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto
Perubahan APBD Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
----	---------	----------	------------



1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 524.866.250,00	PAPBD 2023
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 957.799.170,00	PAPBD 2023
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	Rp 9.968.750,00	PAPBD 2023
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 130.471.250,00	PAPBD 2023
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 155.843.750,00	PAPBD 2023
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 37.996.250,00	PAPBD 2023
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 26.666.300,00	PAPBD 2023
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.868.358.850,00	PAPBD 2023
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 6.284.033.536,00	PAPBD 2023
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 13.066.755.951,00	PAPBD 2023
	Jumlah Total	Rp 29.062.760.057,00	PAPBD 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja DLH Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja tahun 2023 disajikan juga dalam bab ini. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi



Bupati Mojokerto tahun 2023 yang merupakan tahun ke lima dalam periode Renstra kabupaten Mojokerto 2021 – 2026.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Pencapaian Indikator Kinerja per Sasaran Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,7	54,71	103,81%
2.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,5	71,23	85,30%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,77	49,26	98,97%
		Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau	18,39%	64%

No	SASARAN STRATEGIS KINERJA LAINNYA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	87,33	99,24%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	92,48%	97,35%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	40	85,31	213%
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui		Jumlah Inovasi yang	1 Inovasi	1 Inovasi	100%



Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			
---	---	--	--	--

Gambar : Data Dukung Hasil Perhitungan IKA,IKU,IKL yang dapat diunduh pada website :

<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>





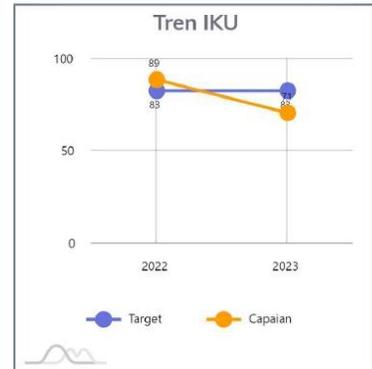
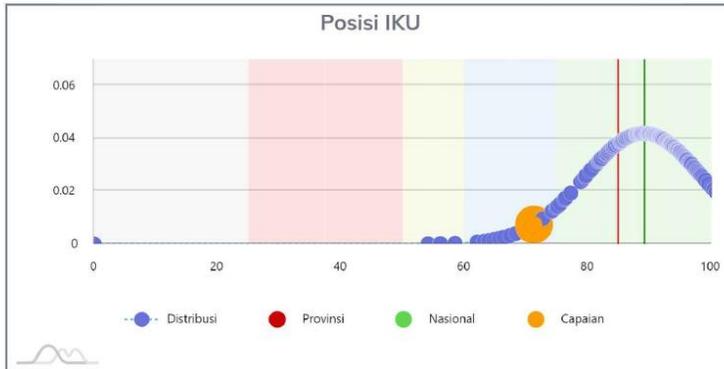
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
2023



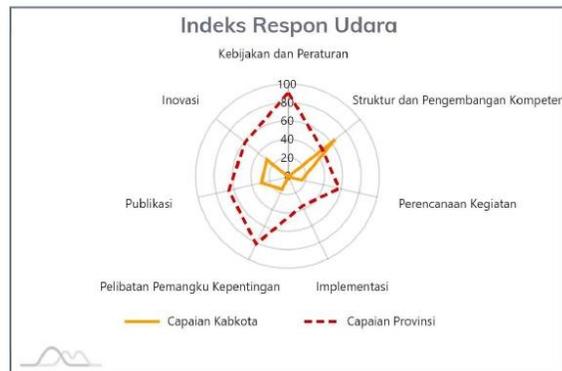
IKU
71.23
BAIK

Indeks Respon IKU
5.02

Peringkat
Nasional : 430 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 36 dari 38 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	8	8	8
TOTAL	12	16	16



Rekomendasi





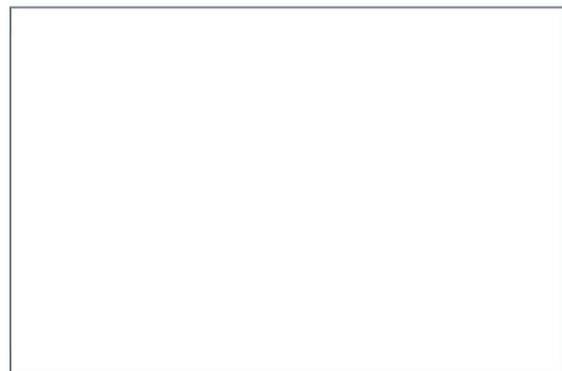
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
2023



IKL
49.26
KURANG

Indeks Respon IKL
13.46

Peringkat
Nasional : 240 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 15 dari 38 Kabupaten/Kota



Indikator untuk menentukan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam, yaitu (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS,pH, DO, BOD, COD, Total



Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli, (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂ dan (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan dan kawasan lindung. Pada Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai target dan Indeks Kualitas Udara (IKU) serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 belum mencapai target yang sudah ditetapkan, karena adanya penambahan RTH Sooko seluas 1000m² masih belum memenuhi target minimal yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH dengan ketiga komponennya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indikator sasaran kedua adalah Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau, indikator sasaran kedua tercapai sesuai target karena semua RTH dan Taman yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup semua telah tertangani dengan baik dengan merawat tanaman, pohon dan kebersihan setiap hari.

1.1.1 Capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kualitas Air	52,7	60	61,33	54,71



	Lingkungan Hidup dan Perlindungan Sumber Daya Alam	(IKA)				
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,5	90,18	89,37	71,23
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,77	48,71	48,71	49,26
3	Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang tertangani	Persentase penanganan ruang terbuka hijau	18,39%	-	16,10%	64%

No	SASARAN STRATEGIS KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	80,06 (A)	88,11 (A)	87,33
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	-	94,08%	92,48%
		Indeks Profesionalitas ASN	40	-	38,43	85,31
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan dan Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Air mengalami penurunan nilai antara tahun 2022



dan tahun 2023, namun terdapat perbedaan dalam perhitungan data. Pada Tahun 2022 pemantauan dilakukan pada 12 titik sungai dengan 44 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, DO-MAX, NO₃-N, Total Fosfat, Fecal Coliform, Kecerahan, Klorofil, Total Coliform, Temperatur Air, Temperatur Udara, Minyak Lemak, Detergen Total, Fenol, TDS, Sulfat, Klorida, Nitrit, Amoniak, Total Nitrogen, Florida, Belerang sebagai H₂S, Sianida, Klorin Bebas, Warna, Sampah, Ba, B, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr-6, Aldrin/Dieldrin, BHC, Chlordane, DDT, Endrin, Heptachlor, Lindane, Methoxychlor, Toxapan, Radioaktivitas Gross A, Radioaktivitas Gross B). Kemudian pada tahun 2023 pemantauan dilakukan pada 14 Titik Sungai pada hulu dan hilir sebanyak 2 kali dalam setahun dengan 12 parameter (pH, TSS, TDS, BODs, COD, DO, Tembaga (Cu), Cobalt (Co), H₂S, Nitrat (NO₃-N)*), Fecal Coli, Total Fosfat). Pada Tahun 2023 uji kualitas air badan air di Kabupaten Mojokerto dilakukan pada 14 Titik Sungai hulu dan hilir dengan 2 kali pengambilan sample dalam satu tahun. Tabel uji kualitas air badan air disajikan dalam Tabel 3.3 dibawah ini dan hasil dari uji kualitas air ini dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) untuk mendapatkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA).



Tabel 3.3

Hasil uji kualitas air badan air di sungai Kabupaten Mojokerto pada 14 titik dilakukan pada 2 periode.

Tanggal Sampling	Lokasi Air Sungai			pH	Hasil Uji Kualitas												
					TDS	BODs	COD		DO	Tembaga (Cu)	Cobat (Co)	Seng (Zn)	H2S	Nitrit sebagai N	Fecal Coli	Total Coli	Total Fosfat sebagai P
16 Maret 2023	Hulu Sungai Pikatan	- 7.6458	112.5131	7,76	120	1,83	6,07		7,16					0,492	350		0,0382
16 Maret 2023	Hilir Sungai Pikatan	- 7.6131	112.4969	7,76	108	6,08	20		6,28					0,48	550		0,0617
16 Maret 2023	Hulu Sungai Cumpleng	- 7.6714	112.5461	8,18	140	1,79	5,85		7,2					0,455	395		0,0534
16 Maret 2023	Hilir Sungai Cumpleng	- 7.5419	112.5514	7,88	121	1,58	5,25		7,32					0,488	395		0,088
31 Maret 2023	Hulu Sungai Sadar	- 7.4731	112.4656	7,21	208	2,45	7,83		7,07					1,14	350		0,144
28 Maret 2023	Hilir Sungai Sadar	- 7.5242	112.6111	7,48	198	6,36	21,2		6,56					1,54	700		0,135
16 Maret 2023	Hulu Sungai Kromong	- 76.719	1.125.353	7,56	187	1,58	3,71		7,44					2,06	350		0,0773
16 Maret 2023	Hilir Sungai Kromong	- 7.6311	112.51	7,61	110	1,76	5,85		7,18					0,475	470		0,0717
04 April 2023	Hulu Sungai Marmoyo	- 7.4333	112.3983	7,96	238	5,26	17,5		6,73					0,553	215		0,291
04 April 2023	Hilir Sungai Marmoyo	- 7.4111	112.4733	8,14	240	4,47	14,9		6,94					0,582	315		0,218



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

04 April 2023	Hulu Sungai Kwangen	- 7.3972	112.48 11	8,1	452	4,84	16		7,05					3,32	470		0,128
04 April 2023	Hilir Sungai Kwangen	- 7.4064	112.48 64	8,11	401	6,48	21,5		6,57					0,881	470		0,329
04 April 2023	Hulu Sungai Kedungsoro	- 7.5919	112.39 81	7,8	178	5,02	16,6		6,67					0,65	470		0,181
04 April 2023	Sungai Kedungsoro	- 7.4181	112.43 11	7,87	193	4,72	15,6		6,91					0,552	315		0,168
31 Maret 2023	Sungai Brangkal	- 7.5717	112.42 61	7,56	108	1,52	3,12		7,37					0,518	420		0,236
31 Maret 2023	Hilir Sungai Brangkal	- 7.5236	112.41 5	7,52	121	1,86	6,15		7,21					0,519	350		0,0765
28 Maret 2023	Hulu Sungai Sumber Kembar	- 7.5131	112.55 39	7,24	186	7,81	26		6,04					0,707	850		0,443
28 Maret 2023	Hilir Sungai Sumber Kembar	- 7.5039	112.55 69	7,95	218	5,39	17,8		6,52					0,877	850		0,164
31 Maret 2023	Hulu Sungai Jurangcetot	- 7.6319	112.41	7,75	80	1,68	5,23		7,27					0,45	290		0,0179
31 Maret 2023	Hilir Sungai Jurangcetot	- 7.6028	112.41 72	7,64	77	1,78	5,77		7,31					0,464	290		0,0166
28 Maret 2023	Hulu Sungai Sumberwaru	- 7.5436	112.62 14	7,32	271	7,2	23,9		6,3					0,839	700		0,113
28 Maret 2023	Hilir Sungai Sumberwaru	- 7.5447	112.64 5	7,26	276	6,78	22,6		6,42					1,2	470		0,102
28 Maret 2023	Hulu Sungai Kali Maron	- 7.6153	112.58 44	7,71	118	4,12	13,6		7,03					0,482	600		0,0545
28 Maret 2023	Hilir Sungai Kali Maron	- 7.5681	112.57 44	7,83	110	4,66	15,5		6,64					0,479	550		0,0601
16 Maret 2023	Tengah Sungai Cempleng	- 7,6080	112,53 38 E	8,03	125	2,16	7,11		6,82					0,463	395		0,082



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

		S															
4 April 2023	Hilir Sungai Kedungsoro	- 7,4323 S	112,46 15 E	8,06	201	6,11	20		6,02					0,755	350		0,229
31 Maret 2023	Hulu Sungai Brangkal	- 7,6260 S	112,42 36 E	7,78	123	2,08	6,96		7,23					0,498	315		0,0578
28 Maret 2023	Hulu Sungai Gembolo	- 7,6603 S	112,58 02 E	7,64	78	2,37	7,63		7,31					0,462	315		0,0351
28 Maret 2023	Tengah Sungai Gembolo	- 7,6054 S	112,55 85 E	7,55	109	2,55	8,34		7,21					0,54	550		0,0854
28 Maret 2023	Hilir Sungai Gembolo	- 7,5222 S	112,57 07 E	7,44	136	6,12	20,4		6,26					0,578	550		0,0864
17 November 2023	Hulu Sungai Pikatan	- 7.6458	112.51 31	7,28	126	4,25	12,1		6,3					0,467	410		0,0121
17 November 2023	Hilir Sungai Pikatan	- 7.6131	112.49 69	7,42	88	4,91	13,9		6,3					0,525	410		0,0453
17 November 2023	Hulu Sungai Cumpleng	- 7.6714	112.54 61	7,71	246	4,43	12,6		6,26					0,482	480		0,0121
17 November 2023	Hilir Sungai Cumpleng	- 7.5419	112.55 14	7,38	196	6,18	17,4		5,96					0,472	840		0,0121
13 November	Hulu Sungai Sadar	- 7.4731	112.46 56	7,62	605	21,4	60,6		2,74					0,552	1100		1,35



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2023																	
17 November 2023	Hilir Sungai Sadar	- 7.5242	112.61 11	6,82	164	7,33	20,8		4,31					0,453	1500		0,0121
17 November 2023	Hulu Sungai Kromong	- 76.719	1.125. 353	7,95	245	7,09	20,1		7,25					0,463	630		0,0121
17 November 2023	Hilir Sungai Kromong	- 7.6311	112.51	7,71	156	3,22	8,96		6,24					0,478	330		0,0121
13 November 2023	Hulu Sungai Marmoyo	- 7.4333	112.39 83	7,38	316	6,99	19,7		5,32					0,798	460		0,246
13 November 2023	Hilir Sungai Marmoyo	- 7.4111	112.47 33	8,32	352	7,66	21,8		5,58					0,513	810		0,354
13 November 2023	Hulu Sungai Kwangen	- 7.3972	112.48 11	7,68	726	16,3	46,5		3,28					6,08	1400		0,377
13 November 2023	Hilir Sungai Kwangen	- 7.4064	112.48 64	8,18	721	12,7	35,9		3,46					5,89	830		0,384
13 November 2023	Hulu Sungai Kedungsoro	- 7.5919	112.39 81	7,86	352	9,47	26,9		3,89					0,476	820		0,68
13 November 2023	Sungai Kedungsoro	- 7.4181	112.43 11	7,92	280	8,81	24,9		5,56					1,46	920		0,502
17 November	Sungai Brangkal	- 7.5717	112.42 61	7,46	159	7,76	22,1		5,13					0,523	580		0,104



Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2023																	
17 November 2023	Hilir Sungai Brangkal	- 7.5236	112.41 5	7,27	250	6,36	18,1		5,36					1,02	700		0,244
13 November 2023	Hulu Sungai Sumber Kembar	- 7.5131	112.55 39	7,69	247	6,27	17,8		5,4					2,28	580		0,156
17 November 2023	Hilir Sungai Sumber Kembar	- 7.5039	112.55 69	7,24	273	2,98	8,45		6,99					1,73	460		0,0259
17 November 2023	Hulu Sungai Jurangcetot	- 7.6319	112.41	7,4	103	6,91	19,7		5,17					0,513	700		0,0121
17 November 2023	Hilir Sungai Jurangcetot	- 7.6028	112.41 72	7,27	106	6,61	18,9		5,68					0,514	700		0,0121
17 November 2023	Hulu Sungai Sumberwaru	- 7.5436	112.62 14	6,95	273	5,4	15,2		5,62					0,46	250		0,311
17 November 2023	Hilir Sungai Sumberwaru	- 7.5447	112.64 5	7,6	239	4,67	13,3		7,29					2,67	460		0,0583
17 November 2023	Hulu Sungai Kali Maron	- 7.6153	112.58 44	7,68	208	3,16	8,85		7,45					0,483	400		0,0121
17 November 2023	Hilir Sungai Kali Maron	- 7.5681	112.57 44	7,14	189	3,4	9,53		6,74					0,466	310		0,0121
17 November	Tengah Sungai Cumpleng	- 7,6080	112,53 38 E	7,75	200	5,58	15,8		6,91					0,499	150		0,0121

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

2023		S															
13 November 2023	Hilir Sungai Kedungsoro	- 7,4323 S	112,46 15 E	7,81	251	6,09	17,3	5,11					0,7	460		0,551	
17 November 2023	Hulu Sungai Brangkal	- 7,6260 S	112,42 36 E	7,54	112	4,85	13,7	5,8					0,816	400		0,061	
17 November 2023	Hulu Sungai Gembolo	- 7,6603 S	112,58 02 E	7,46	246	5,58	15,6	7,73					0,466	380		0,0121	
17 November 2023	Tengah Sungai Gembolo	- 7,6054 S	112,55 85 E	7,81	133	2,98	8,45	6,54					0,707	340		0,0121	
17 November 2023	Hilir Sungai Gembolo	- 7,5222 S	112,57 07 E	7,32	265	4,31	12,2	7,35					1,74	400		0,0121	



Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar 89,37 mengalami penurunan sebesar 20,30% menjadi 71,23 pada tahun 2023. Terdapat persamaan titik pantau yang dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022 dilakukan pemantauan di 8 titik, sedangkan untuk tahun 2023 dilakukan di 8 titik tetapi lokasi pemantauan ada perbedaan dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Hasil Uji Udara Ambien menggunakan metode Passive Sampler baik dari KLHK maupun APBD Tahun 2023

Tahun Sampling	Lokasi	No. Seri	Hasil Uji	
			SO2 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	NO2 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
			900	400
2023	Kantor DLH Jl. Pemuda No 55 B		4,67	16
2023	Taman Lalu Lintas Jl. Hayam Wuruk Mojosari		6	16
2023	Perumahan Wisma Pungging Permai Kec. Pungging		8,02	9
2023	Ngoro Industrial Park (NIP)		7,34	9,62
2023	Tugu UKS, Jl. Jayanegara Kab. Mojokerto		22,5	39
2023	Perum Japan Asri, Sooko, Mojokerto		18	26,5
2023	Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto		18	26,5
2023	Halaman PT. Sunrise Steel		25	33,5

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya. Untuk mengetahui kondisi pencemaran udara yang terjadi di suatu wilayah perlu dilakukan upaya pemantauan kualitas udara ambien. KLHK melalui Ditjen PPKL-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), sampai saat ini telah membangun peralatan pemantuan kualitas udara ambien secara otomatis atau biasa disebut AQMS (*Air Quality Monitoring System*) di 26 kota di Indonesia salah satunya berada di Kabupaten Mojokerto yang ditempatkan di Taman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. AQMS dapat menghasilkan data



kualitas udara berupa konsentrasi udara ambien dan parameter meteorologi (arah angin, kecepatan angin, temperatur, kelembaban udara, radiasi matahari, curah hujan) secara otomatis, real time, dan kontinyu. Selanjutnya data kualitas udara tersebut diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) melalui papan tayang dan website <https://iku.menlhk.go.id/aqms>

Selanjutnya pengambilan sample untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan bulan November 2023 dimana masih dalam periode musim kemarau yang panjang sehingga mempengaruhi parameter meteorology diantaranya tingginya radiasi matahari, rendahnya kelembapan udara dan curah hujan, hal ini mempengaruhi hasil data kualitas udara yang diperoleh yaitu cenderung tidak memenuhi baku mutu. Selain itu faktor yang mempengaruhi turunnya kualitas udara adalah meningkatnya aktivitas masyarakat setelah PSBB ditiadakan diantaranya penggunaan kendaraan pribadi, usaha dan/atau kegiatan (industri) yang menjadi sumber pencemar udara sehingga semakin bertambah juga polusi udara yang dikeluarkan. Diharapkan dalam perubahan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau *new normal*, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan bijak agar kualitas udara tetap terjaga dengan baik.

Indeks Kualitas Lahan menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Perbedaan jumlah sampel akan mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lahan tahun 2022 sebesar 48,71 mengalami kenaikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,55 menjadi sebesar 49,26. Adanya peningkatan Indeks Kualitas Lahan



(IKL) dipengaruhi oleh penambahan luas RTH Sooko dan penambahan RTH di masing-masing desa atau kecamatan di Mojokerto.

1.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan akhir periode Renstra

Adapun untuk mengetahui tingkat kemajuan capaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan akhir periode renstra dapat dijelaskan pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI HINGGA TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,3	54,71	102,64%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85	71,23	83,8%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50,46	49,26	97,62%
2.	Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang tertangani	Persentase penanganan ruang terbuka hijau	25,30%	64%	252%

No	SASARAN STRATEGIS KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI HINGGA TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,94 (A)	87,33 (A)	104,04%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat	95%	92,48%	97,35%



		Daerah			
		Indeks Profesionalitas ASN	76,50	85,31	111,52%
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	100%	100%

1.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya. Kinerja DLH Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 memiliki kesamaan dengan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu sama-sama menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi, namun terdapat perbedaan komponen dalam perhitungan IKLH Nasional dan IKLH Provinsi Jawa Timur dengan IKLH Kab. Mojokerto yaitu tidak adanya komponen Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di Kabupaten Mojokerto, hal ini karena wilayah Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah kelautan.



Data capaian IKLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan DLH Provinsi Jawa Timur saat ini jika dibandingkan dengan capaian IKLH Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah ini.

Gambar : Capaian IKLH Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
2023



Kepala Daerah : dr. IKFINA FAHMAWATI
Luas Wilayah : 98464.3133148376 Km²
Populasi : 1,119,209 jiwa

Kepala DPRD : Hj. AYNI ZUROH, S.E, MM.
Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL
Pendapatan Per Kapita : 77,530,000

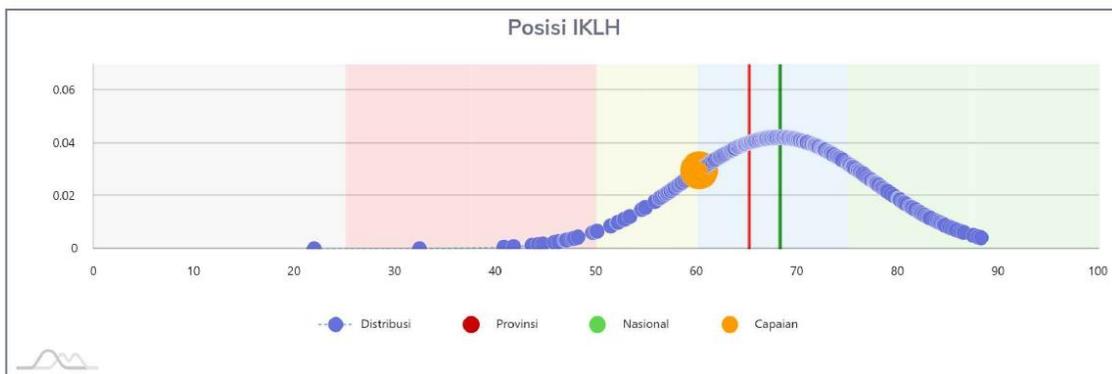
IKLH
60.20

SEDANG

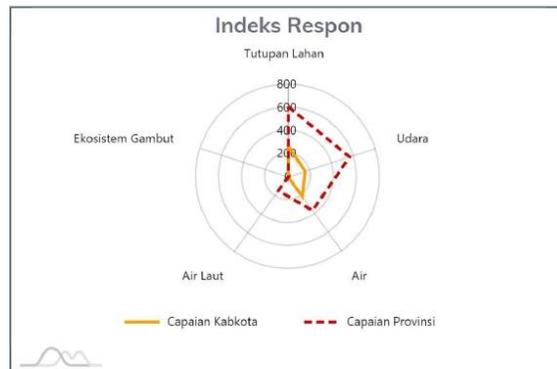
Indeks Respon
27.09

Peringkat

Nasional : 389 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 31 dari 38 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	12	16	16
AIR	34	69	68
LAHAN	0	1	1
TOTAL	46	86	85



Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>



Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasional

Indeks	2020	2021	2022	2023	Kategori
IKA Nasional	53,53	52,70	53,88	54,59	
IKU Nasional	86,75	87,36	88,06	88,67	
IKL Nasional	59,54	60,72	60,72	61,79	
IKAL Nasional	71,49	81,04	84,41	78,84	
IKLH Nasional	70,27	71,41	72,42	72,54	Baik
IKA Prov. Jatim	56,13	53,57	56,13		
IKU Prov. Jatim	84,06	83,20	84,28		
IKL Prov. Jatim	63,72	50	47,36		
IKAL Prov. Jatim	65,40	82,46	85,45		
IKLH Prov. Jatim	67,70	68,29	69,92		Belum mendapat data
IKA Kab. Mojokerto	60	60	61,33	54,71	
IKU Kab. Mojokerto	88,26	90,18	89,37	71,23	
IKL Kab. Mojokerto	49,20	48,71	48,71	49,26	
IKLH Kab. Mojokerto	64,19	69,75	69,92	60,20	Sedang

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>



Tabel 3.7 Predikat IKLH

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas dapat dibandingkan bahwa nilai IKLH Tahun 2023 Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2021. Nilai IKLH Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,01 Poin dengan nilai IKLH Tahun 2020 sebesar 71,41 menjadi 72,42. Nilai IKLH Provinsi mengalami peningkatan sebesar 1,63 Poin dari IKLH Tahun 2021 sebesar 68,29 menjadi 69,92 untuk Tahun 2022. Nilai IKLH Nasional lebih tinggi karena didukung oleh Capaian IKLH dari Provinsi diluar Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan dan lautan yang menyumbang poin tertinggi pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Meskipun capaian IKLH Kabupaten Mojokerto masih dibawah IKLH Nasional, namun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2021 ketahun 2022 sebesar 0,24%. Nilai IKLH Nasional dan Provinsi dipengaruhi oleh Nilai IKA, IKU, IKL dan IKAL. Hal ini berbeda dengan Nilai IKLH Kabupaten Mojokerto yang dipengaruhi oleh nilai IKA, IKU dan IKL karena Kabupaten Mojokerto tidak memiliki Kawasan Laut serta Kawasan laut merupakan kewenangan Provinsi dan/atau Nasional. Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mempengaruhi nilai IKLH dengan rumus penentuan IKLH untuk Provinsi dan Nasional dihitung dengan Rumus:

$$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$$



Sedangkan untuk nilai IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kawasan laut dihitung menggunakan rumus:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

1.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang telah dilakukan.

➤ Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan, tetapi telah memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 3,81%. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas air. Beberapa faktor yang muncul dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air adalah sebagai berikut: Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) didukung oleh:

1. Meningkatnya alih fungsi lahan terutama di daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian dengan tanaman semusim yang menyebabkan berkurangnya jumlah dan debit mata air;
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya air;
3. Semakin tingginya beban pencemaran limbah domestik yang berasal dari pemukiman yang linier terhadap penambahan penduduk;
4. Meningkatnya populasi industri UKM di daerah-daerah pedesaan yang mengolah makanan maupun minuman namun tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan yang memadai; dan



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto memiliki program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air, seperti kegiatan program kali bersih, pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan limbah industri serta peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat mengurangi sampah yang masuk ke badan air. Hal yang perlu untuk ditingkatkan dalam pengelolaan kualitas air adalah pemantauan kualitas air.



Gambar 3.1 dan 3.2 Kegiatan Program Kali Bersih Tahun 2023 Di Desa Awang-Awang Kecamatan Mojosari.





Gambar 3.1 dan 3.2 Kegiatan Program Kali Bersih Tahun 2023 Di Desa Perning Kecamatan Jetis.





Gambar 3.2 Penyerahan Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagai wujud apresiasi bagi lembaga masyarakat dan pelaku industri dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto. Penghargaan yang pertama yaitu lomba sekolah hijau untuk menjangkau sekolah yang akan diberikan pendampingan Sekolah Adiwiyata. Penghargaan yang kedua adalah Adiwiyata diberikan kepada sekolah tingkat Dasar hingga Menengah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri, Provinsi dan Nasional, yang ketiga adalah Peka Kelola diberikan kepada Pelaku Industri yang memenuhi kriteria Ketaatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam usaha/kegiatan dan Industri. Penghargaan keempat adalah Desa Berseri, kelima Program Kampung Iklim dan keenam Program Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup.





Gambar 3.3 Penanaman 900 bibit tanaman serentak di Kecamatan Kutorejo, Gedeg dan Jetis Kab. Mojokerto dalam rangka memperingati Hari Penanaman Pohon Indonesia (HMPI) untuk pemulihan lahan kritis.



Gambar 3.4 Rencana Pemulihan Kerusakan Lingkungan





Gambar 3.5 Evakuasi sampah agar tidak masuk badan air



Gambar 3.6 Kunjungan SMPN 2 Gedeg ke TPA Karangdiyeng untuk belajar tentang jenis2 sampah dan serta pengolahannya.

Dengan pengenalan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik sedini mungkin kepada siswa, diharapkan semakin tinggi kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Mojokerto tentang



bagaimana proses pengolahan sampah yang baik serta memanfaatkan sampah yang ada disekitar kita.



Gambar 3.6 Kunjungan SDN Gedangan Kecamatan Kutorejo ke TPA Karangdiyeng untuk pengenalan pengelolaan sampah menjadi kompos yang dapat berguna untuk menyuburkan tanaman.



Gambar 3.6 Pelatihan Pengelolaan Sampah Reduce, Refuse, Recycle (3R) bagi kader lingkungan PKK Kab. Mojokerto.



Peningkatan peran masyarakat dapat membantu dalam menjaga kualitas air. Masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap kualitas air. Untuk itu diperlukan adanya program yang lebih mengedukasi dan melibatkan langsung masyarakat dalam menjaga kualitas air.

➤ Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar 89,37 mengalami penurunan sebesar 18,14% menjadi 71,23. Tahun 2023 pemantauan kualitas udara dilakukan di 8 titik yang dianggap mewakili sebagai sumber pencemar sedangkan tahun 2023 dilakukan di 8 Titik. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 18,14 %. Penurunan kualitas udara menandakan adanya pencemaran udara, pencemaran dapat dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya semakin banyaknya pemukiman penduduk disekitar titik uji, kualitas emisi cerobong dari insutri dan kualitas emisi kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu. Dinas Lingkungan hidup telah memiliki program yang dapat membantu meminimalkan pencemaran udara, salah satunya yaitu pengawasan dan pemantauan industri yang menghasilkan emisi. Setiap industri yang menghasilkan emisi harus memiliki izin dan melakukan pemantauan secara rutin untuk dilaporkan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.





Gambar 3.7 Sosialisasi Penilaian Ketaatan Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peka kelola.



Gambar 3.7 Pengawasan dan pemantauan industri yang menghasilkan emisi.





Gambar 3.8 Uji emisi sumber kendaraan salah satu upaya terhadap pengendalian polusi udara yang disebabkan dari emisi kendaraan bermotor.

Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara adalah dengan meningkatkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi untuk menyaring polusi dan memproduksi oksigen. Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman yang mampu untuk menyerap polusi di area sekitar sumber pencemar dapat meningkatkan kualitas udara.



Gambar 3.9

Pemanfaatan lahan Kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk Ruang Terbuka Hijau.





Gambar 3.10

Pengambilan sample udara untuk diuji dengan metode passive sampler dari KLHK.

➤ Indeks Kualitas Tutupan (IKL)

Adanya peningkatan IKL sebesar poin disbanding tahun lalu dipengaruhi oleh penambahan luas RTH Sooko dengan lokasi samping SMA Sooko sebesar 1 Ha.



Gambar 3.11 RTH Jatirejo





Gambar 3.11 RTH Taman Sooko direalisasikan pada Tahun 2023

Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target tahun 2023 hanya IKA yang memenuhi target sedangkan IKU dan IKL belum memenuhi target, sedangkan bila dibandingkan tahun 2022 maka walaupun IKA dan IKU mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022, sedangkan IKL mengalami peningkatan yang disebabkan adanya penambahan RTH Sooko.

1.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut pemaparan penggunaan sumber daya anggaran tahun 2023.



Tabel 3.8 Alokasi Sasaran Pembangunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	% PENYERAPAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	8,403,193,850	7,972,015,846	95%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	350,977,550	339,049,500	97%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	957,799,170	924,163,229	96%
2.	Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau	6,284,033,536	5,505,436,226	88%

No	SASARAN STRATEGIS KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	13,066,755,951	12,135,165,479	93%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	29,062,760,057	26,875,830,280	92,47%
		Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta	-	-	-



		berkelanjutan			
--	--	---------------	--	--	--

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	103,81%	95%	8,81
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,30%	97%	(11,7)
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	98,97%	96%	(2,97)
2.	Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau	348%	88%	260
No	SASARAN STRATEGIS KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,24%	93%	6,23
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,35%	92,47%	4,88
		Indeks Profesionalitas ASN	213%	-	-
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui	Jumlah Inovasi yang terinternalisa	100%	-	-



Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	si dan tersosialisasi serta berkelanjutan				
---	---	--	--	--	--

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,7	54,71	103,81%	8,403,193,850	7,972,015,846	95%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,5	71,23	85,30%	350,977,550	339,049,500	97%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,77	49,26	98,97%	957,799,170	924,163,229	96%
2.	Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau	18,39%	64%	348%	6,284,033,536	5,505,436,226	88%
No	SASARAN STRATEGIS KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	87,33	99,24%	13,066,755,951	12,135,165,479	93%



		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	92,48%	97,35%	29,062,760,057	26,875,830,280	92,47%
		Indeks Profesionalitas ASN	40	85,31	213%	-	-	-
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	-	-	-

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator kinerja IKA memperoleh anggaran sebesar Rp. 8,403,193,850,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,972,015,846,- atau 95%. Capaian kinerja IKA tahun 2023 sebesar 103,81% yaitu 54,71 dari 52,7 yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja IKA sebesar 8,81

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator kinerja IKU dianggarkan sebesar Rp. 350,977,550,- dan terealisasi sebesar Rp. 339,049,500,- atau 97%. Hasil capaian kinerja IKU tahun 2023 adalah 85,30% atau 71,23 dari 83,5 yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator IKU sebesar (11,7).

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indikator kinerja IKL dianggarkan sebesar Rp. 957,799,170,- dan terealisasi sebesar Rp. 924,163,229,- atau 96%. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 348%. Hasil capaian IKL tahun 2023 sebesar 49,26 dari target yang ditetapkan sebesar 49,77. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber



daya pada indikator IKL sebesar (2,97). Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak mencapai target disebabkan karena anggaran yang ada hanya untuk perawatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan belum dapat untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau selain itu pengelolaan inventarisasi data yang kurang baik sehingga terdapat beberapa data yang belum terinventarisasi dan menyebabkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) belum mencapai target.

d. Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau

Indikator kinerja Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau dianggarkan sebesar Rp. 6,284,033,536,- dan terealisasi sebesar Rp. 5,505,436,226,- atau 88%. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 98,97%. Hasil capaian IKL tahun 2023 sebesar 64 dari target yang ditetapkan sebesar 18,39. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator IKL sebesar (260).

1.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang akan dijelaskan merupakan realisasi anggaran program-program pembangunan yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023. Secara terinci realisasi anggaran program-program pembangunan akan dijelaskan melalui Tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran dan Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto Tahun 2023

SASARAN/INDIKATOR SASARAN/URUSAN/URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (K)	REALISASI (K)
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau						
		1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)	8,403,193,850	7,972,015,846	52,7	54,71
		1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	350,977,550	339,049,500	83,5	71,23
		1.3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	957,799,170	924,163,229	49,77	49,26
		2.1 Persentase peningkatan penanganan ruang terbuka hijau	6,284,035,536	5,505,436,226	18,39%	64%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	13,066,755,951	12,135,165,479	88 (A)	87,33 (A)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program PD yang tercapai	11,409,000	11,307,000	95%	107.65%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5,869,000	5,794,600	2 Dokumen	2 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5,540,000	5,512,400	5 Laporan	5 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	12,029,443,000	11,187,459,844	95%	92,48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12,029,443,000	11,187,459,844	145 Orang/Bulan	128 Orang/Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	-	75	85,31
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas, pakaian batik khas DLH, dan Pakaian Olahraga Hari Jumat	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berkompeten untuk mengikuti diklat	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	171,800,000	165,042,908	97%	97%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17,500,000	17,467,000	5 Paket	5 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15,000,000	14,525,900	15 Paket	15 Paket



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	13,000,000	12,099,800	7 Paket	7 Paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	34,300,000	29,474,400	4 Paket	4 Paket
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10,000,000	9,995,000	12 Laporan	12 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	82,000,000	81,480,808	12 Laporan	12 Laporan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	8,000,000	7,811,350	97%	97%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8,000,000	7,811,350	3 Unit	3 Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	514,740,201	473,738,659	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	298,740,201	260,495,203	12 Laporan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	216,000,000	213,243,456	12 Laporan	12 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	331,363,750	289,805,718	100%	97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	245,450,000	214,498,080	82 Unit	81 unit
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	60,913,750	53,060,400	3 Unit	3 Unit
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	25,000,000	22,247,238	40 Unit	40 Unit
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	524,866,250	520,358,450	56.41%	57%



1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84,866,250	82,405,900	67,4%	82%
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan PPLH Kabupaten/Kota yang disusun	56,250,000	54,854,200	4 Dokumen	4 Dokumen
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	28,616,250	27,551,700	106 Dokumen	110 Dokumen
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana	440,000,000	437,952,550	22%	22%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	440,000,000	437,952,550	2 Dokumen	2 Dokumen
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	957,799,170	924,163,229	48.91%	43.42%
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara	816,322,120	789,584,529	65,09%	51%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah air, udara dan laut	116,571,250	110,724,240	6 Dokumen	6 Dokumen
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	699,750,870	678,860,289	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran/kerusakan lingkungan	41,027,500	38,870,400	11,11%	11,11%
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	18,923,750	18,181,400	2 Laporan	2 Laporan
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	22,103,750	20,689,000	22 Titik	22 Titik
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan	100,449,550	95,708,300	2,8%	3,13%



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	18,572,000	17,168,300	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	45,202,550	42,775,400	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	36,675,000	35,764,600	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	6,284,033,536	5,505,436,226	69%	89%
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola	6,284,033,536	5,505,436,226	69%	89%
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang tersusun	-	-	-	-
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota	29,790,000	25,907,000	0,0835 Ha	0,0835 Ha
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	5,651,487,500	4,957,503,015	8,2 Ha	9,2 Ha
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembinaan konservasi kepada masyarakat	-	-	-	-
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	602,756,036	522,026,211	1030 Unit	1030 Unit
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	9,968,750	9,936,400	100%	100%
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	6,640,000	6,621,500	62,66%	74,04%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3	6,640,000	6,621,500	3 Laporan	3 Laporan
2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut	3,328,750	3,314,900	37,33 %	25,96%



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3,328,750	3,314,900	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	130,471,250	123,763,900	57.60%	66.33%
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan / atau lingkungan yang memiliki persetujuan lingkungan dan / atau persetujuan pemerintah daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	130,471,250	123,763,900	20,83%	19,60%
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat yang meningkat kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup	14,160,000	12,520,500	2 Orang	2 Orang
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	109,163,750	104,645,150	215 Laporan	196 Laporan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	7,147,500	6,598,250	5 Dokumen	5 Dokumen
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	155,843,750	151,109,400	14.94%	19.49%
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten yang terselenggara	155,843,750	151,109,400	100%	100%



	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	19,475,000	19,014,400	3 Lembaga	3 Lembaga
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	96,368,750	92,255,000	2 Dokumen	2 Dokumen
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	40,000,000	39,840,000	50 Orang	80 Orang
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	37,996,250	37,600,200	39%	44.83%
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten yang terlaksana	37,996,250	37,600,200	100%	100%
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	37,996,250	37,600,200	30 Entitas	30 Entitas
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	26,666,300	26,576,000	70%	100%
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang terselesaikan	26,666,300	26,576,000	80%	100%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	22,961,300	22,912,800	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	3,705,000	3,663,200	1 Dokumen	1 Dokumen



PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	7,868,358,850	7,441,720,996	99%	46.09%
1	Pengelolaan Sampah	1. Persentase pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto 2. Persentase sampah yang tertangani	7,868,358,850	7,441,720,996	1. 27% 2. 72%	1. 29,23% 2. 16,86%
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	37,415,000	34,492,377	2 Dokumen	2 Dokumen
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaurulangan dan pemanfaatan kembali	3,775,805,000	3,755,732,500	2 Laporan	2 Laporan
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	2,140,823,850	1,949,614,519	34.561,85 Ton	29,162 Ton
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	215,330,000	198,495,600	50 Kelompok	80 Kelompok
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir	1,698,985,000	1,503,386,000	1 Unit (Zona Aktif TPA Karangdiyeng)	1 Unit (Zona Aktif TPA Karangdiyeng)
Jumlah			29,062,760,057	26,875,830,280		



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto didalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memiliki 4 pilar salah satunya pilar pembangunan lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu pembangunan yang berwawasan lingkungan harus senantiasa diintegrasikan dalam setiap aspek pembangunan yang merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat. sehingga SDA yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut



beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target – target yang sudah ditetapkan didalam Perubahan RENSTRA DLH Kabupaten Mojokerto. Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut adalah telah tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas lahan (IKL) serta sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan penanganan ruang terbuka hijau dengan indikator Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.